

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjelaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat (2) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional secara berkelanjutan.

Pendidikan formal, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah, menjadi sarana utama dalam mewujudkan tujuan konstitusional tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab memastikan tersedianya sistem pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah adalah Program Wajib Belajar 12 Tahun, yang bertujuan menjamin setiap warga

negara memperoleh kesempatan pendidikan dasar hingga menengah tanpa diskriminasi.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan melaksanakan sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Program Wajib Belajar 12 Tahun tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif terhadap tantangan global. Implementasi kebijakan ini menjadi wujud komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, tanggung jawab tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan warga negara di wilayahnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun agar berjalan efektif sesuai standar yang ditetapkan.

Peran pemerintah daerah tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang menengah. Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya mencakup penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pengembangan

kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan mutu pendidikan.

Implementasi otonomi daerah di sektor pendidikan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program pendidikan yang lebih kontekstual, relevan, dan efektif dalam menjawab permasalahan lokal, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Tegal sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Program tersebut mencakup pendidikan dasar selama enam tahun dan pendidikan menengah selama enam tahun yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menegaskan bahwa pendidikan menjadi kewenangan daerah di samping urusan kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Tegal juga menetapkan kebijakan daerah yang secara khusus ditujukan untuk menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), yaitu melalui Program ASELA DIJAKETI (Ayo Sekolah Lagi Pendidikan Kejar Paket dan Inklusi) yang

mulai dilaksanakan sejak tahun 2021. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan alternatif melalui layanan pendidikan kesetaraan (kejar paket) dan pendidikan inklusi bagi anak-anak yang terhambat mengakses pendidikan formal.

Program ASELA DIJAKETI dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2020–2025, serta didukung oleh Peraturan Wali Kota Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang program Ayo Sekolah lagi yang mengatur pelaksanaan program pendidikan nonformal dan inklusi. Kehadiran program ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan marginal.

Namun, dalam praktiknya, permasalahan putus sekolah di Kota Tegal masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 44 anak putus sekolah yang terdiri dari 20 anak SD/MI dan 24 anak SMP/MTs. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 198 anak, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan keterbatasan pembelajaran daring. Pada tahun 2022 angka tersebut menurun menjadi 3 anak, namun kembali meningkat menjadi 20 anak pada tahun 2023, menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah belum sepenuhnya teratasi secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pendataan yang dilakukan melalui Program ASELA DIJAKETI pada tahun 2025 mencatat sebanyak 203 anak yang tergolong sebagai ATS dan APS. Dari jumlah tersebut, 97 anak menjadi sasaran langsung program pendidikan kesetaraan yang terdiri atas 32 anak Paket A, 26 anak Paket B, dan 39 anak Paket C. Selain itu, sebanyak 103 anak tercatat telah berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan hingga lulus. Data ini menunjukkan bahwa Program ASELA DIJAKETI berkontribusi dalam membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya terhambat mengikuti pendidikan formal.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui evaluasi program untuk menilai bagaimana pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI di lapangan, termasuk mekanisme pelaksanaan, keterlibatan aktor pelaksana, serta hambatan yang dihadapi dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada evaluasi pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI di Kota Tegal, guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelaksanaan program dalam memperluas akses pendidikan bagi anak putus sekolah, tanpa menitikberatkan pada pengukuran penurunan angka putus sekolah secara kuantitatif.

**Tabel 1.1 Data Angka Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS)
di Kota Tegal Tahun 2020-2025**

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APS SD/MI Sederajat	20	181	3	12	-	-
2.	APS SMP/MTS Sederajat	24	17	-	8	-	-
3.	ATS/APS Paket A	-	-	-	-	-	32
4.	ATS/APS Paket B	-	-	-	-	-	26
5.	ATS/APS Paket C	-	-	-	-	-	39
	Total	44	198	3	28	-	97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

**Tabel 1.2 Data Rinci Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah
(APS) di Kota Tegal Tahun 2025**

No	Kategori/Status	Jumlah	Presentase %
1.	Sasaran Program paket A, B, C	97	47,78
	- Paket A (BPB: 12, DO: 20)	32	15,76
	- Paket B (DO: 12, LTM: 14)	26	12,81
	- Paket C (DO: 18, LTM: 21)	39	19,21
2.	Alumni yang Telah Lulus	103	50,74
3.	Belum Terlayani/Terkendala	3	1,48
	Total data teridentifikasi	203	100,000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Keterangan: - BPB = Belum Pernah Bersekolah

- DO = Drop Out (Putus Sekolah)

- LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

(Lulus kelas 6 untuk Paket B, lulus kelas 9 untuk Paket C)

Tabel 1.3 Data Alasan Anak Tidak Bersekolah atau Putus Sekolah di Kota Tegal Tahun 2025

No	Alasan/kategori	Jumlah	Presentase (%)
1.	Bekerja (membantu ekonomi keluarga)	131	65,50
2.	Mau Sekolah (dapat dilayani)	29	14,50
3.	Tidak Mau Bersekolah	27	13,50
4.	Tidak Ada Biaya	8	4,00
5.	Hilang/Tidak Diketahui Alamatnya	8	4,00
6.	Menikah	7	3,50
7.	Mutasi (pindah tempat tinggal)		
8.	Penyandang Disabilitas	6	3,50
9.	Melanjutkan ke Ponpes	3	1,50
10.	Tidak Ditemukan	3	1,50
11.	Masalah Kesehatan	1	0,50
12.	Perundungan (Bullying)	1	0,50
	Total kasus tercatat	200	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Keterangan: Beberapa anak dapat memiliki lebih dari satu alasan, sehingga total kasus (200) berbeda dengan total anak teridentifikasi (203)

Analisis lebih mendalam terhadap penyebab putus sekolah berdasarkan data tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1b menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi kendala terbesar. Sebanyak 131 anak (65,50%) dari total 200 kasus yang tercatat harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, terutama di sektor warteg dan nelayan (mayang) yang menjadi mata pencaharian dominan masyarakat Kota Tegal, khususnya di wilayah pesisir. Kondisi ini sejalan dengan data kemiskinan Kota Tegal yang menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 7,64% pada tahun 2024, dengan garis kemiskinan Rp 664.922 per kapita per bulan. Keterbatasan ekonomi keluarga memaksa anak-anak usia sekolah

untuk turut bekerja, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengikuti pendidikan formal yang memiliki jadwal tetap dan kaku.

Selain faktor ekonomi, data menunjukkan bahwa 27 anak (13,50%) tidak mau bersekolah karena berbagai alasan personal seperti trauma akibat perundungan, merasa tidak cocok dengan sistem sekolah formal, atau kehilangan motivasi belajar. Sementara itu, 8 anak (4,00%) memiliki keinginan untuk bersekolah namun terkendala biaya, dan 29 anak (14,50%) masih memiliki kemauan untuk bersekolah dan dapat dilayani melalui Program ASELA DIJAKETI. Faktor lain yang berkontribusi meliputi pernikahan dini (7 anak atau 3,50%), perpindahan tempat tinggal atau mutasi (7 anak atau 3,50%), penyandang disabilitas yang belum mendapat layanan pendidikan inklusif (6 anak atau 3,00%), perundungan atau bullying (1 anak atau 0,50%), serta hambatan geografis berupa jarak sekolah yang jauh dari rumah (1 anak atau 0,50%).

Tantangan operasional juga muncul dalam bentuk 8 anak (4,00%) yang hilang atau tidak diketahui alamatnya, serta 3 anak (1,50%) yang tidak ditemukan saat proses pendataan, mengindikasikan perlunya sistem pendataan dan pelacakan yang lebih baik untuk memastikan seluruh anak usia sekolah terjangkau oleh program. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa penanganan putus sekolah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan intervensi multi-dimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan aksesibilitas, sebagaimana dirancang dalam Program ASELA DIJAKETI.

Tabel 1.4 Data Angka Putus Sekolah Daerah di Jawa Tengah

No	Daerah	Presentase Putus Sekolah	No	Daerah	Presentase Putus Sekolah
1.	Kab.Grobogan	49,85	18	Kab.Semarang	29,46
2.	Kab. Banjarnegara	45,97	19	Kota Tegal	28,64
3.	Kab. Pemasang	43,11	22.	Kab. Wonogiri	28,04
4.	Kab. Wonosobo	42,35	23.	Kab.Demak	28,01
5.	Kab. Pekalongan	41,82	24.	Kab. Rembang	27,9
6.	Kab. Batang	41,24	25.	Kab.Blora	26,34
7.	Kab Kudus	38,48	26.	Kab Kebumen	25,37
8.	Kab. Brebes	37,97	27.	Kota Surakarta	24, 42
9.	Kab. Magelang	35,16	28.	Kab.Klaten	23,32
10.	Kab. Tegal	34,77	29.	Kab. Boyolali	22,74
11	Kab. Pati	34,44	30.	Kab. Sragen	22,71
12	Kab Cilacap	34,05	31.	Kab. Purworejo	20, 79
13	Kota Pekalongan	34,05	32.	Kab. Salatiga	19,69
14	Kab. Jepara	33, 33	33.	Kota Salatiga	19, 23
15	Kab Purbalingga	32,66	34.	Kota Magelang	14, 89
16	Kota Semarang	32,09	35.	Kab. Karanganyar	14,44
17	Kab. Kendal	29,79			

Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah pada tahun 2023 di Kota Tegal, masih terdapat orang dari umur 7-18 Tahun yang putus sekolah atau tidak bersekolah sebanyak 28,64%, angka tersebut menjadi yang terbesar nomor 19 dari 35 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan data tersebut angka persentase yang termasuk besar mengindikasikan bahwa program yang dilakukan pemerintah Kota Tegal belum berjalan dengan efektif dan masih perlu untuk dilakukan evaluasi pada program tersebut. Angka putus sekolah dapat dikatakan baik jika menyentuh di angka 1% sedangkan 28,64% masih belum memenuhi standar yang baik.

Di wilayah pesisir, misalnya, anak-anak sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensi, mulai dari kemiskinan, kurangnya kesadaran

akan pentingnya pendidikan, hingga masalah infrastruktur yang tidak memadai. Banyak keluarga di daerah pesisir Kota Tegal berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka lebih berfokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Mereka tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan, seperti biaya seragam, buku, dan transportasi, yang pada akhirnya mendorong tingginya angka putus sekolah. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang masih rendah di kalangan penduduk setempat.

Tidak hanya di wilayah pesisir namun pada wilayah perkotaan Orang tua juga sering kali tidak memahami dampak pendidikan yang lebih luas bagi masa depan anak-anak mereka, terutama dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai di daerah pesisir. Tidak jarang, sekolah-sekolah di wilayah tersebut memiliki gedung yang kurang layak, perpustakaan yang minim koleksi, laboratorium yang tidak berfungsi, serta fasilitas olahraga yang tidak memadai. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar, sehingga anak-anak yang berada di lingkungan ini cenderung kehilangan motivasi untuk bersekolah. Kurangnya dukungan dalam bentuk infrastruktur yang layak ini juga disebut sebagai salah satu faktor penghambat utama dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di wilayah pesisir dan daerah-daerah terpencil.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Pemerintah Kota Tegal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh anak-anak di daerah

tersebut, termasuk yang berada di wilayah pesisir, mendapatkan hak mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Meski kebijakan nasional tentang wajib belajar telah dicanangkan, implementasinya di tingkat lokal membutuhkan upaya yang lebih intensif, baik dalam hal peningkatan infrastruktur maupun penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Purwanto (2020), pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan struktural dan memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan agar program pendidikan bisa berjalan efektif dan inklusif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program ASELA DIJAKETI lahir sebagai respons terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang memperparah angka putus sekolah di Kota Tegal. Pada masa pandemi, banyak siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan fasilitas seperti laptop dan internet. Akibatnya, sejumlah siswa tidak naik kelas bahkan berhenti sekolah. Kondisi inilah yang mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal untuk menginisiasi program "Ayo Sekolah Lagi" yang kemudian berkembang menjadi ASELA DIJAKETI dengan melibatkan SKB sebagai pelaksana pendidikan non-formal.

Selain faktor pandemi, program ini juga merespons berbagai permasalahan struktural seperti jarak lokasi layanan pendidikan yang jauh dari domisili peserta didik sehingga membutuhkan biaya transportasi tambahan, belum tersedianya layanan pendidikan inklusi yang memadai bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak usia sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, terutama di sektor warteg dan

nelayan (mayang). Keterbatasan sarana pembelajaran di rumah juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal untuk mengatasi permasalahan ini meluncurkan program “ASELA DIJAKETI “(Ayo Sekolah Lagi yang Terintegrasi dengan Pelayanan Pendidikan Kejar Paket dan Inklusi), yang dirancang khusus sebagai respons terhadap tingginya angka putus sekolah, terutama di wilayah pesisir yang secara sosial dan ekonomi rentan. Program “ASELA DIJAKETI” tidak hanya bertujuan menurunkan angka putus sekolah, tetapi juga memberikan solusi komprehensif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal. Program ini mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan non-formal, termasuk pendidikan kejar paket A, B, dan C, yang ditujukan untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal reguler, serta pendidikan inklusi yang mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dengan pendekatan yang fleksibel, “ASELA DIJAKETI” berupaya menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak yang selama ini belum terjangkau oleh sistem formal dan memberi mereka kesempatan untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik.

Program “ASELA DIJAKETI” dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan daerah terpencil, di mana kemiskinan, akses infrastruktur yang terbatas, serta rendahnya kesadaran akan

pentingnya pendidikan menjadi hambatan utama. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari (2021), pendidikan kejar paket memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak dan remaja yang tidak bisa mengakses pendidikan formal karena berbagai keterbatasan. Dengan menyediakan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar, program ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Selain itu, program “ASELA DIJAKETI” juga memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti beasiswa, penyediaan sarana belajar seperti buku dan seragam, serta pendampingan intensif untuk memastikan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Upaya pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah dengan angka putus sekolah tinggi, seperti melalui perbaikan gedung sekolah dan penyediaan fasilitas laboratorium, perpustakaan, serta sarana olahraga, juga sejalan dengan penelitian Haryanto (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur di daerah terpencil berdampak signifikan pada penurunan angka putus sekolah.

Dalam pelaksanaan program Ayo Sekolah Lagi Pendidikan kejar paket dan inklusi (ASELA DIJAKETI), penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif guna menilai efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Mengingat data yang menunjukkan bahwa sebanyak 102 anak masih tercatat sebagai putus sekolah, angka ini terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi program ASELA DIJAKETI harus dilakukan dengan cermat untuk memahami tantangan

yang masih dihadapi dan mengevaluasi dampak dari berbagai intervensi yang telah diterapkan. Evaluasi ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang keberhasilan program, tetapi juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menentukan apakah program ASELA DIJAKETI perlu dilanjutkan, diperluas, atau direvisi. Kebijakan pendidikan yang berkelanjutan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan, seperti wilayah pesisir di Kota Tegal. Mengingat tantangan yang ada dan pentingnya pendidikan sebagai investasi untuk masa depan, pemerintah perlu mempertimbangkan pengalokasian sumber daya yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung program ini. Dengan langkah-langkah evaluasi yang tepat, diharapkan program ASELA DIJAKETI dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak hanya menurunkan angka putus sekolah, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program "ASELA DIJAKETI" di Kota Tegal?
2. Bagaimana Evaluasi Program “ASELA DIJAKETI” di Kota Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI di Kota Tegal.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI.
3. Untuk menganalisis dampak Program ASELA DIJAKETI terhadap akses pendidikan bagi anak putus sekolah di Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam meningkatkan implementasi program ASELA DIJAKETI, khususnya dalam mengurangi angka putus sekolah. Dengan informasi evaluatif yang diperoleh, dinas terkait dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran, termasuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, menyediakan pelatihan tambahan bagi tenaga pengajar, serta memperluas cakupan program ke wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi putus sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pesisir, tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Kesadaran ini penting untuk membangun dukungan komunitas terhadap keberlanjutan program, sehingga masyarakat juga turut berperan aktif dalam memastikan pendidikan yang layak dan berkelanjutan bagi setiap anak. Melalui pendekatan yang berbasis bukti dari penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan

dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan di Kota Tegal, sehingga program ASELA DIJAKETI dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dalam pembahasan penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Indriani Noviasuti & Kushandajani	Evaluasi Program Njuh Sekolah Maning Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pemalang Tahun 2021	Menilai keberhasilan Program Njuh Sekolah Maning dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Program ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah putus sekolah, karena hanya 26 dari 278 anak yang berhasil kembali bersekolah. Kriteria evaluasi yang belum terpenuhi adalah efektivitas, efisiensi, dan pemerataan program
2.	Rafika Dewy, Andries	Efektivitas Inovasi Program	Penelitian ini bertujuan untuk	Metode Kualitatif: Penelitian ini	Hasil analisis menunjukkan bahwa

	Lionardo, Novita Wulandari	Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang Tahun 2022	menganalisis efektivitas Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) dalam menekan angka putus sekolah di Kota Palembang, khususnya bagi anak jalanan dan anak yang telah putus sekolah	menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) di Kota Palembang cukup efektif dalam menekan angka putus sekolah. Keberhasilan program ini didukung oleh kejelasan tujuan, strategi pencapaian yang terencana, serta proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik. Namun, terdapat penghambat seperti kurangnya sarana dan prasarana kerja serta pelaksanaan program yang belum sepenuhnya efektif.
3.	Nur Lidya Nurson dan Windi Juwita Sari	Program Paket Kesetaraan Upaya Mengatasi Angka Putus	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami implementasi	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program

		Sekolah. Tahun 2024	program Paket Kesetaraan dan dampaknya terhadap pengurangan angka putus sekolah di Indonesia, terutama bagi anak-anak yang terpinggirkan secara ekonomi.	pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan observasi partisipatif	Paket Kesetaraan di PKBM memiliki peran signifikan dalam mengurangi angka putus sekolah, dengan partisipasi peserta yang aktif dan dukungan masyarakat lokal sebagai faktor pendukung utama.
4.	Morin Benjamin, Agustinus Pati, dan Frans Singkoh	Strategi Dinas Pendidikan dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah di Kota Bitung Tahun 2021	Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bitung dalam mengurangi angka anak putus sekolah.	Penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan 11 informan, termasuk kepala dinas, kepala sekolah, dan orang tua.	Strategi yang diterapkan cukup baik, termasuk kebijakan wajib belajar 12 tahun, bantuan dana, beasiswa, serta program BSM dan PIP. Tantangan yang dihadapi antara lain masalah ekonomi, lingkungan keluarga, dan kurangnya motivasi pendidikan di masyarakat

5.	Ailsyah Putri Oktaviani, Adi Soesiantoro	Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah dengan Program Kejar Paket PKBM di Kelurahan Pucang Sewu 2023	Menganalisis upaya yang dilakukan dalam menangani anak putus sekolah di Kelurahan Pucang Sewu melalui Program PKBM	Survei dan wawancara deskriptif kualitatif, berfokus pada faktor penyebab putus sekolah dan langkah mitigasi oleh perangkat kelurahan	Alasan utama putus sekolah adalah ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, dan masalah keluarga. Pemerintah kelurahan mendukung anak putus sekolah dengan Program Kejar Paket yang memberi kesempatan mendapatkan ijazah untuk memperoleh pekerja
----	--	---	--	---	--

Beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan memiliki perbedaan dengan substansi, tujuan, maupun metode yang digunakan di dalam penelitian ini. Dari kelima penelitian terdahulu secara substansi lebih fokus pada upaya penanganan dan bentuk strategi dalam mengatasi angka putus sekolah. Penelitian ini mencoba mengevaluasi program secara menyeluruh, tidak hanya pada tingkat keberhasilan dalam menurunkan angka putus sekolah tetapi juga keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Peneliti ingin mengeksplorasi sejauh mana program ASELA DIJAKETI memengaruhi komunitas, termasuk efektivitas, tantangan, dan keberlanjutan implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas

kebijakan program ASELA DIJAKETI dengan fokus lebih mendalam pada keberlanjutan program dan dampak jangka panjangnya pada masyarakat.

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus dengan pendekatan yang terbatas pada deskripsi implementasi kebijakan atau efektivitas program. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis mendalam terhadap data empiris, termasuk wawancara langsung dengan subjek seperti siswa, alumni, dan pengelola program. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga dampaknya.

Dengan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar teori, penelitian ini mengeksplorasi aspek yang belum disentuh sebelumnya, seperti keberlanjutan program dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat Kota Tegal. Penelitian ini turut mempertimbangkan dampak struktural dari kebijakan pendidikan pada komunitas marginal, mengintegrasikan pendidikan inklusif sebagai salah satu landasan utama analisis.

Kesimpulannya, penelitian ini bukan hanya sekadar pengulangan dari penelitian sebelumnya, tetapi melengkapi kesenjangan dengan analisis kritis terhadap program ASELA DIJAKETI dari segi keberjalanan dan keberlanjutannya, serta dampak sosial-ekonominya pada masyarakat lokal. Hasilnya diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan mengandung segala aspek penting mulai dari perencanaan hingga implementasi. Implementasi kebijakan melahirkan berbagai dampak yang dirasakan oleh sasaran tertentu. Dalam melihat keberjalanan suatu kebijakan, diperlukan suatu monitoring dan evaluasi guna melihat aspek apa saja yang masih kurang efektif dan harus diperbaiki oleh pemangku kebijakan. Dalam konteks ini, sebuah kebijakan memerlukan instrumen evaluasi dan pengawasan untuk melihat sejauh apa efektivitas program tersebut berjalan.

Menurut Grindle dan Thomas (1991), evaluasi kebijakan merupakan akhir dari proses yang dimulai dari merumuskan, menguji, mengadopsi kebijakan, sampai implementasi dan melihat evaluasi kebijakan yang sudah terjadi. Hal ini membuat hasil evaluasi menjadi aspek fundamental yang berhubungan langsung dengan investigasi terhadap keberhasilan tujuan dari objek penelitian. Evaluasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengukur langkah di masa depan (Husein, 2017). Keberjalanan evaluasi kebijakan memerlukan sejumlah informasi pendukung di dalam implementasi program. Ini mengapa dalam suatu analisis penelitian kebijakan diperlukan indikator yang tepat guna menghasilkan analisa objektif dan tepat sasaran.

Bentuk evaluasi dalam kebijakan menyesuaikan dengan keadaan serta hasil terhadap implementasi yang dijalankan. Sebuah kebijakan pun memiliki tahapan yang relative panjang guna mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Konseptualisasi dalam evaluasi kebijakan menggarisbawahi berbagai indikator untuk meninjau

lebih dalam mengenai cara kerja kebijakan dan pemenuhan target terhadap sasaran dari sebuah kebijakan.

Lebih lanjut, sebuah keberjalanan program dan kebijakan dapat dianalisis berdasarkan beberapa faktor dan indikator agar sesuai dengan tujuan utama. Sebab, setiap kebijakan harus memiliki tujuan rasional yang selaras dengan pelaksanaannya. Menurut Edward A. Suchman (1967), dalam teori tujuan rasional memandang efektivitas program pemerintah sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Suchman, program pemerintah dianggap efektif jika hasil akhirnya konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan diukur melalui indikator kinerja yang spesifik. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian hasil konkret yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target program. Bali, Capano, dan Ramesh (2019) melihat efektivitas sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu analitik, politik, dan operasional. Tiga dimensi tersebut menjadi instrument utama dalam menilai sebuah kebijakan yang telah berjalan.

Instrumentalitas merujuk pada sejauh mana instrumen kebijakan yang dipilih sesuai dengan tujuan kebijakan dan konteks implementasinya. Kapasitas, di sisi lain, mencakup kemampuan pemerintah dan aktor lain yang terlibat untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Desain kebijakan yang efektif pun harus mempertimbangkan kedua aspek ini secara bersamaan, karena instrumen kebijakan yang tepat tidak akan berfungsi optimal jika tidak didukung oleh kapasitas yang memadai, dan sebaliknya.

Pada dimensi instrumentalitas mencakup beberapa aspek penting. Pertama, *coherence* (koherensi), yang menilai konsistensi internal antar komponen kebijakan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, *calibration* (kalibrasi), yang berkaitan dengan ketepatan intensitas intervensi kebijakan sesuai dengan skala masalah yang dihadapi. Ketiga, *complementarity* (komplementaritas), yang mengevaluasi bagaimana berbagai instrumen kebijakan dapat saling melengkapi dan memperkuat. Keempat, *consistency* (konsistensi), yang menilai kesesuaian kebijakan baru dengan kebijakan yang sudah ada. Kelima, *contextual suitability* (kesesuaian kontekstual), yang mempertimbangkan relevansi instrumen kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik setempat.

Selain itu, dimensi kapasitas dalam terdiri dari beberapa aspek yang sama pentingnya. Pertama, *analytical capacity* (kapasitas analitis), yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk desain kebijakan. Kedua, *operational capacity* (kapasitas operasional), yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk implementasi. Ketiga, *political capacity* (kapasitas politik), yang mencakup kemampuan membangun dukungan politik dan mengelola resistensi terhadap kebijakan. Keempat, *regulatory capacity* (kapasitas regulasi), yaitu kemampuan untuk menetapkan dan menegakkan aturan yang diperlukan. Kelima, *coordination capacity* (kapasitas koordinasi), yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai aktor dan lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Bali, Capano, dan Ramesh berpendapat bahwa mempertimbangkan dimensi-dimensi ini secara komprehensif dapat membantu perancang kebijakan

mengidentifikasi potensi kelemahan dan meningkatkan efektivitas desain kebijakan.

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti memilih untuk menganalisa implementasi dan evaluasi kebijakan mengadopsi teori Bali, Capano, dan Ramesh (2019). Sebab, penelitian mencoba untuk mengungkapkan lebih dalam melalui berbagai dimensi efektivitas keberjalanan dalam sebuah kebijakan. Selain itu, teori ini dapat digunakan sebagai indikator ideal dalam menilai keberhasilan, baik bagi aspek teoritis maupun empiris. Dalam hal ini, teori Bali, Capano, dan Ramesh (2019) menjadi relevan dengan tujuan peneliti dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang sudah berjalan.

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah dan kerangka analisis yang digunakan, sehingga penelitian tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi program, yang dipahami sebagai upaya untuk menggambarkan dan memahami pelaksanaan suatu program berdasarkan proses dan hasil yang tampak di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi program dimaknai sebagai proses deskriptif untuk mengungkap bagaimana Program ASELA DIJAKETI dilaksanakan, bagaimana mekanisme kerja program berjalan, serta bagaimana pengalaman dan respons para pelaksana dan peserta program terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tidak dimaksudkan sebagai penilaian normatif

atau pengukuran keberhasilan secara kuantitatif, melainkan sebagai sarana untuk memahami kondisi aktual pelaksanaan program.

Kerangka pemikiran Bali, Capano, dan Ramesh (2019) digunakan dalam penelitian ini sebagai alat bantu konseptual untuk membaca dan mengorganisasi temuan penelitian secara sistematis. Dimensi analitik, politik, dan operasional dipahami sebagai sudut pandang analisis dalam mendeskripsikan pelaksanaan program, bukan sebagai indikator pengukuran numerik. Dengan demikian, teori tersebut berfungsi untuk memperdalam analisis deskriptif terhadap pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI berdasarkan data empiris di lapangan.

Melalui penggunaan konsep ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI serta berbagai faktor yang mempengaruhi upaya penurunan angka putus sekolah di Kota Tegal.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep

Dari konsep teori yang telah diuraikan, peneliti mengoperasionalkan konsep evaluasi kebijakan sebagai kerangka analisis kualitatif dalam penelitian ini. Dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Bali, Capano, dan Ramesh (2019) digunakan sebagai panduan analisis dan fokus penggalian data, bukan sebagai alat pengukuran kuantitatif. Operasionalisasi konsep ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyusun alur penelitian serta merumuskan pertanyaan wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan mengevaluasi pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI secara mendalam berdasarkan temuan

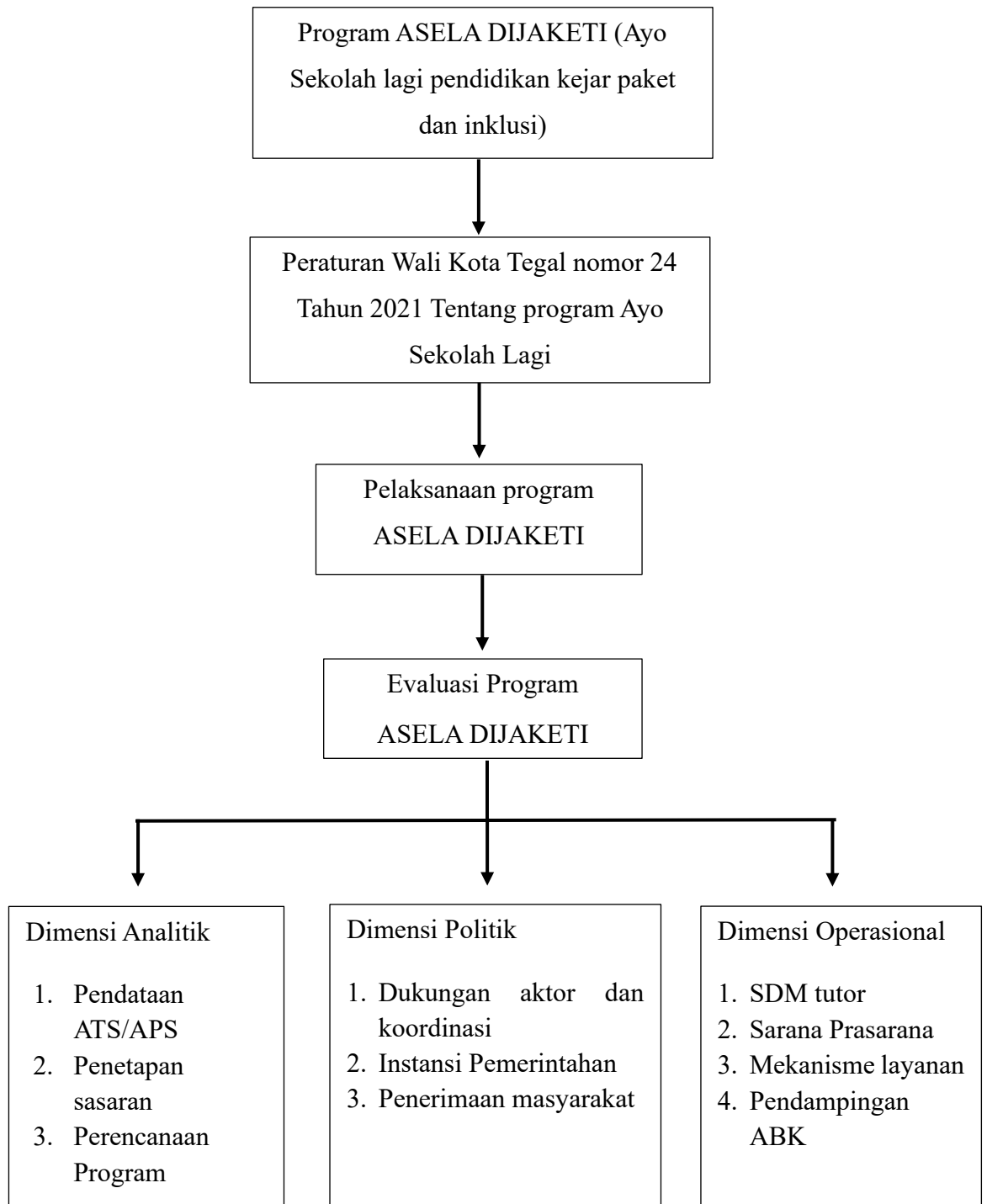
empiris di lapangan, dengan memperhatikan kompleksitas proses kebijakan dan konteks implementasinya.

Berdasarkan kerangka Bali, Capano, dan Ramesh (2019), terdapat tiga dimensi utama yang digunakan sebagai fokus analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dimensi Analitik, yang merujuk pada kesesuaian antara desain Program ASELA DIJAKETI dengan permasalahan anak putus sekolah di Kota Tegal, termasuk proses pendataan, penetapan sasaran, serta dasar pertimbangan kebijakan.
2. Dimensi Politik, yang berkaitan dengan dukungan dan keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti pemerintah daerah, lembaga pelaksana, serta masyarakat, termasuk bentuk koordinasi dan legitimasi kebijakan.
3. Dimensi Operasional, yang mencakup aspek teknis pelaksanaan program, seperti ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, kapasitas pelaksana, serta mekanisme koordinasi dalam implementasi Program ASELA DIJAKETI.

Melalui operasionalisasi konsep ini, peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta hambatan dalam pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI secara komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

1.8. Kerangka berpikir



1.9. Argumen Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi program ASELA DIJAKETI sebagai upaya responsif dari Pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan visi yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, evaluasi mendalam sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuannya, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang menghambat implementasi efektifnya. Salah satu aspek penting yang diusung oleh program ini adalah nilai inklusivitas, yang bertujuan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rentan. Namun, keberhasilan inklusivitas ini sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kualitas kurikulum, serta kesadaran masyarakat, yang menjadi fokus kritis dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas program ASELA DIJAKETI secara obyektif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program ASELA DIJAKETI sebagai upaya responsif dari Pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 203 anak yang termasuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), dengan 97 anak menjadi sasaran langsung program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Dari jumlah tersebut, 103 anak telah berhasil menyelesaikan program hingga lulus, menunjukkan capaian positif program dalam memberikan akses pendidikan alternatif. Meskipun demikian,

masih terdapat tantangan signifikan, terutama bagi 131 anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga, serta 27 anak yang menolak untuk bersekolah kembali.

Melalui penelitian ini, kontribusi terhadap literatur dan kebijakan pendidikan diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam evaluasi kebijakan berbasis inklusivitas di daerah otonom. Hasil evaluasi yang diperoleh menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan di masa mendatang, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI dalam upaya menurunkan angka putus sekolah di Kota Tegal berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui perspektif para pelaksana program, peserta, serta pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam implementasi program. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan program, mekanisme kerja, pola koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta pengalaman peserta dalam mengikuti layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusi.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan pengukuran atau pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk

menyajikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI beserta berbagai faktor yang mempengaruhi keberjalanannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi aktual program sebagai dasar dalam melihat capaian dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penurunan angka putus sekolah di Kota Tegal.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI, sehingga relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi program dalam menurunkan angka putus sekolah di Kota Tegal.

1.10.3 Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang inklusif dan mendalam diklasifikasikan menjadi dua sumber data, yakni:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program, seperti Kepala SKB Kota Tegal, pelaksana lapangan ASELA, perwakilan DISDIKBUD, siswa peserta ASELA termasuk siswa ABK, hingga Alumni yang telah mengikuti program. Seluruh informasi yang disampaikan oleh mereka memberikan gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan program,

dinamika lapangan, hambatan yang muncul, serta dampak program terhadap upaya penurunan angka putus sekolah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan bahan pustaka yang relevan. Dokumen tersebut meliputi laporan SKB Kota Tegal, data angka putus sekolah tahun 2023–2024, daftar peserta ASELA, catatan absensi pembelajaran, foto kegiatan, serta regulasi terkait program kejar paket dan pendidikan inklusi. Selain dokumen institusional, peneliti juga menggunakan sumber berupa buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang membantu memperkaya interpretasi data primer. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI.

1.10.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu-individu yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Program ASELA DIJAKETI. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, menyesuaikan dengan kebutuhan data dan relevansi pengetahuan mereka terhadap program. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Rohmani Selaku Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTegal sebagai Penanggung jawab Program ASELA DIJAKETI.
2. Tidar Dwi Septian Selaku PLT Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tegal.

3. Bilqis Ramadhani Selaku perwakilan peserta Program ASELA
DIJAKETI paket A.
4. Ivan Ivan Ramadhani Selaku perwakilan peserta ABK Program
ASELA DIJAKETI paket B.
5. Diar Dwi Pambudi Selaku perwakilan peserta Program ASELA
DIJAKETI paket C.
6. Ivan Nurfansyah Selaku Alumni Siswa ABK Program ASELA
DIJAKETI Paket C.
7. Sutrisno Selaku Alumni Siswa Program ASELA DIJAKETI Paket C.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan hasil penelitian yang berkualitas dan kelengkapan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan dua Teknik untuk mendapatkan data primer, yakni:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara tanpa membatasi pada poin-poin tertentu. Wawancara ini akan dilakukan dengan pendekatan yang mendalam terhadap subjek penelitian, yaitu mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan Topik yang sedang diteliti. Dalam Penelitian ini penulis akan melaksanakan wawancara kepada informan, yakni meliputi, Perwakilan dari Dinas pendidikan sebagai penanggung jawab program, PLT Kepala SKB kota Tegal, peserta program ASELA DIJAKETI dari paket A, B, C

serta Alumni yang telah mengikuti Program ASELA DIJAKETI Wawancara dilaksanakan secara langsung, melalui telepon, maupun via pesan singkat, tergantung pada kondisi dan ketersediaan informan. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika lapangan secara lebih rinci, termasuk kondisi fasilitas SKB, kendala pelaksanaan program, serta pengalaman siswa saat mengikuti PROGRAM ASELA DIJAKETI.

2. Dokumentasi

Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menerapkan teknik pengumpulan data berupa laporan kegiatan, regulasi pelaksanaan program, data siswa putus sekolah, daftar peserta ASELA, foto kegiatan pembelajaran, serta catatan administrasi lainnya. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap wawancara tetapi juga menjadi bukti konkret atas temuan lapangan yang diperoleh peneliti.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian kualitatif analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan terdiri dari beberapa tahapan. Teknik analisis data akan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles and Huberman, adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan sejak awal penelitian, ketika peneliti mulai menyederhanakan dan memilah informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti

mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti pelaksanaan program, faktor pendukung, hambatan, kondisi fasilitas, serta dampaknya terhadap penurunan angka putus sekolah.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif dan tabel temuan lapangan. Penyajian data dilakukan agar hubungan antarfenomena dapat dilihat secara jelas, sehingga peneliti dapat memahami pola-pola yang muncul selama pelaksanaan program ASELA DIJAKETI.

3. Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan bersamaan dengan proses pengumpulan dan analisis data. Kesimpulan yang ditarik berasal dari konsistensi temuan di lapangan yang telah diverifikasi dengan dokumen pendukung. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan mampu menggambarkan efektivitas pelaksanaan Program ASELA DIJAKETI dalam menurunkan angka putus sekolah di Kota Tegal.